

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI SUMATERA UTARA

Putri Sari MJ Silaban¹⁾, Annerika Sianturi²⁾, Jessica Putri Br.Sembiring³⁾

^{1),2),3)} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Penulis Korespondensi: ellonagultom01@gmail.com¹⁾, sianturiannerika@gmail.com²⁾
jessicasembiring76@gmail.com³⁾

Abstract

Ketimpangan merupakan salah satu penghambat dalam pembangunan ekonomi di setiap negara. Perbedaan pendapatan terlihat membuat jarak antara kelompok kaya dan miskin semakin jauh dan kesejahteraan secara tidak merata menunjukkan masih banyak kelas masyarakat atas dengan bawah. Pada penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, IPM dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara. Objek penelitian ini yaitu 33 Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode regresi data panel. Pengolahan data dengan perangkat lunak E-views 12. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan nilai probability 0,2952. Variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan nilai probability 0,0000. Variabel Tingkat pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan dengan nilai probabilitynya sebesar 0,7193. Secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan serta ketiga variabel yang diteliti memiliki kontribusi sebesar 70,57% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Keywords: Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka

Article Information:

Received Date: 13 Januari 2024

Revised Date: 5 Maret 2024

Accepted Date: 21 Maret 2024

PENDAHULUAN

Masalah ketimpangan pendapatan terus menjadi pembahasan setiap negara terutama negara berkembang khususnya negara Indonesia. Awal kemunculan masalah kemiskinan adalah tidak meratanya distribusi pendapatan yang kemudian akan mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Apabila kedua masalah ini dibiarkan berlarut – larut maka akan semakin memperparah keadaan, dan dapat timbulnya konsekuensi negative terhadap kondisi sosial serta politik. Seperti dinyatakan dalam (Chrisamba, 2015) bahwa kegagalan pemerataan distribusi pendapatan tidak hanya berpengaruh buruk terhadap bidang perekonomian saja, tetapi juga sosial, politik dan keamanan. Ketimpangan pendapatan akan menyebabkan tumbuhnya kecemburuan soaial dan kemiskinan yang nantinya dapat berujung pada resiko terbesar seperti kerusakan dan gerakan separatis.

Munculnya permasalahan kesenjangan pendapatan merupakan dampak dari adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak diimbangi dengan pembangunan ekonomi yang merata di suatu daerah sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan yang tinggi antar golongan masyarakat. Hal ini tentu menunjukkan bahwa pembangunan yang terjadi masih belum berkualitas dikarenakan belum semua golongan merasakan pembangunan yang dilakukan. Seperti yang dikatakan (Sukirno, 2007) yaitu pembangunan dapat dikatakan berkualitas apabila pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mendorong distribusi pendapatan yang semakin merata dan tingkat kemiskinan semakin rendah.

Hal yang penting untuk dipantau ialah aspek pemerataan distribusi pendapatan, sebab jika pendapatan di suatu daerah sudah merata maka kesejahteraan pada daerah tersebut juga pasti akan tercapai. Oleh karena itu, masalah ini harus diantisipasi atau paling tidak bisa mengurangnya. Masalah ketimpangan pendapatan memang adalah masalah yang

kompleks dan sifatnya multidimensional. Untuk itu, harus dilakukan langkah penyelesaian akan masalah, dimana upaya penyelesaiannya, harus dilakukan secara komprehensif yang mana artinya adalah beragam hal dalam kehidupan semua lapisan publik dalam suatu negara harus dicakup, serta melaksanakannya harus secara terintegrasi. Hal ini berarti pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan yang akan diambil karena setiap daerah memiliki kebutuhan dan penyebab permasalahan yang berbeda. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maka masalah ketimpangan distribusi pendapatan ini tentu akan dapat diselesaikan.

Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 33 kabupaten/kota ini tentu saja memiliki berbagai persoalan yang harus diselesaikan, diantaranya adalah masalah pemerataan distribusi pendapatan. Kesenjangan pendapatan tentu akan dipengaruhi oleh faktor – faktor yang berbeda di setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan kemampuan yang dimiliki setiap wilayah maupun individu untuk membangun daerahnya berbeda – beda dan sangat dipengaruhi oleh potensi sumber daya yang dimiliki daerah tersebut, misalnya sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya alam buatan (modal dan infrastruktur), sumber daya sosial yang meliputi ekonomi, budaya, adat istiadat, jumlah dan kepadatan penduduk, sarana dan prasarana yang tersedia serta faktor – faktor lain yang mempengaruhi perkembangan pembangunan dan mengakibatkan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi yang dicapai masyarakat di setiap daerah berbeda dan itu jugalah yang menyebabkan ketimpangan dari setiap daerahnya berbeda dengan daerah lainnya.

Faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan di dalam suatu daerah paling dominan adalah meningkatkannya pertumbuhan ekonomi (Todaro, Michael P &

Smith, 2011 : 283). Apabila pertumbuhan ekonomi tidak sebanding dengan pemerataan pembangunan maka daerah yang terbelakang mengalami kemiskinan. Faktor inilah yang selanjutnya akan menyebabkan ketimpangan di suatu daerah.

Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara mengalami Fluktuasi dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah dari Kota Pematang Siantar dimana pada tahun 2019 mencapai 6.05%. Kemudian Kota Medan dimana pada tahun 2019 mencapai 5.93%. Namun Kota Medan dan Pematang Siantar juga tercatat memiliki laju Pertumbuhan Ekonomi yang terendah di Provinsi Sumatera Utara dimana pada tahun 2020 Kota Medan mencapai -1.98% kemudian Kota Pematang Siantar pada tahun 2020 Laju Pertumbuhan Ekonominya mencapai -1,89%.

Pada tahun 2020 secara keseluruhan Laju Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Utara mengalami penurunan yang sangat drastis hal ini disebabkan akibat pandemic Covid-19 yang membuat banyak sektor – sektor ekonomi yang harus berhenti sejenak bahkan ada yang sampai harus gulung tikar. Oleh karena itu pada tahun 2020 keadaan perekonomian memang hancur itulah mengapa pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Sumatera Utara turun drastis bahkan ada yang minus. Namun pada tahun 2021 sudah mulai pulih dan meningkat dari tahun 2020 karena sektor – sektor yang sebelumnya harus pasif sudah dapat berjalan aktif kembali.

Selain faktor jumlah penduduk faktor lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah IPM. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan dan kualitas masyarakat digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Menurut BPS IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

Tingkat IPM di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara mengalami Fluktuasi. Namun

untuk daerah yang memiliki IPM tertinggi adalah Kota Medan dengan IPM sebesar 81.76 di tahun 2022. Dan untuk yang terendah adalah Kabupaten Nias Barat dengan IPM sebesar 60,42 pada tahun 2018. Berdasarkan buku BPS 2015 IPM berada di < 60 yang berarti di daerah tersebut memiliki tingkat IPM yang rendah. Hal itu berarti tingkat IPM di Kabupaten Nias Barat tergolong IPM yang rendah.

Ketidakmerataan tingkat IPM menyebabkan perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang ada di setiap daerah, ada daerah yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang lebih baik ada pula daerah yang SDM nya masih tergolong rendah. Oleh karena itu, IPM memiliki hubungan yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Dimana semakin tinggi IPM maka semakin tinggi produktivitas penduduk sehingga tingkat pendapatan akan semakin tinggi, sebaliknya jika IPM rendah maka produktivitas akan rendah dan akan berpengaruh pada pendapatan. Seperti yang dikemukakan oleh Becker (dalam Suryani & Woyanti, 2021) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan. Hubungan yang sama juga dijelaskan (Arafah & Khoirudin, 2022) dalam penelitiannya yaitu IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Perbedaan ketimpangan di setiap daerah tentu tergantung pada kebijakan pemerintah yang ada di daerah tersebut bagaimana usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia di daerahnya.

Ketimpangan pendapatan juga dapat terjadi jika tingkat pengangguran di suatu wilayah tinggi. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan seseorang tidak dapat menerima pendapatan atau upah sehingga terjadi pelebaran kesenjangan antara penduduk kaya dan penduduk miskin.

Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tingkat pengangguran terbuka yang tinggi berada di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Langkat. Dimana Kota Medan

sebanyak 10.81% pada tahun 2021. Kemudian Kabupaten Deli Serdang ada sebanyak 9.13% di tahun 2021 dan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten tapanuli tengah ada sebanyak 7.97% pada tahun 2022. Ketiga kabupaten inilah yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi dan untuk kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran terendah adalah pakpak bharat yaitu sebanyak 0.19% di tahun 2019. Hal tentu akan berhubungan dengan jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut, dimana di kota medan memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Sementara untuk Kabupaten Pakpak Bharat memang memiliki jumlah penduduk yang cukup sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang lainnya yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yoertiara & Feriyanto, 2022) memperoleh hasil dimana tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan 6 Provinsi di Pulau Jawa dalam periode 2012 – 2021. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Suryani & Woyanti, 2021) dimana pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2010 – 2018.

Ketimpangan pendapatan jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan permasalahan baru. Masalah yang akan muncul seperti keparahan tingkat kemiskinan, penangan dan perbaikan yang akan semakin sulit, kesenjangan sosial dan juga banyaknya gejolak sosial yang akan timbul.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Masyarakat di Sumatera Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketimpangan Pendapatan

Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat atau dengan kata lain pembangunan haruslah dilakukan secara merata. Akan terjadi berbagai masalah apabila distribusi pembangunan tidak dilakukan secara merata, salah satunya ialah ketimpangan distribusi pendapatan. hal ini dapat terjadi karena dengan pembangunan yang hanya terjadi di beberapa daerah saja dan hanya dirasakan oleh segelintir orang saja maka akan menyebabkan jarak yang lebar antara golongan atas dan golongan menengah kebawah. Dengan demikian, maka akan semakin tinggilah ketimpangan pendapatan antar masyarakat. Jika kondisi seperti ini dibiarkan secara terus menerus akan mengakibatkan terganggunya kondisi perekonomian di suatu daerah bahkan negara.

Menurut (Ns.Hidayati. et al, 2022) indikator untuk melihat bagaimana distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah pada waktu tertentu adalah dengan melihat bagaimana ketimpangan pendapatannya. Apabila ketimpangan pendapatannya rendah maka pemerataan distribusi pendapatan pada daerah tersebut terdistribusi secara merata namun sebaliknya jika ketimpangannya tinggi maka distribusi pendapatannya tidak merata. Disparitas pendapatan merupakan kondisi dimana terjadi ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan pada setiap orang dikalangan kelompok masyarakat (Faried. et al, 2023).

Chayyani (2021:110) menyimpulkan ketimpangan sebagai berikut: “ketimpangan adalah belum meratanya pendapatan di seluruh kalangan masyarakat baik itu dalam bentuk kepemilikan individu, maupun kepemilikan faktor produksi. Dengan kata lain ketimpangan distribusipendapatan merupakan kondisi output pembangunan yang diberikan pemerintah namun tidak dapat dirasakan oleh rakyatnya secara merata”.

Simon Kuznet menyatakan dalam tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan lebih mengarah ke semakin buruk atau dapat dikatakan kesenjangan akan meningkat tetapi ketika berjalan ke periode selanjutnya akan semakin baik. Tujuan utama dari pembangunan ialah mengentaskan masalah kemiskinan dan ketidakmerataan pendistribusian pendapatan. Dari kurva tersebut Kuznet menjelaskan bahwa sesungguhnya pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator untuk melihat dampak dari pembangunan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi berarti peningkatan pendapatan perkapita masyarakat akibat dari pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Teori yang dikemukakan oleh Kuznets terkait dengan korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Dimana pada tahap awal pembangunan ekonomi akan terjadi kemerosotan pada distribusi pendapatan kemudian pada periode selanjutnya pemerataan akan semakin membaik. Dengan meningkatnya pendapatan perkapita maka ketimpangan pendapatan juga akan meningkat, selanjutnya akan menurun seperti yang dijelaskan Kuznet dalam penelitiannya yaitu teori U terbalik.

Pada saat proses pembangunan ekonomi baru dimulai, kesempatan dan peluang pembangunan yang ada, secara umum akan digunakan oleh daerah – daerah yang keadaan pembangunan di daerah tersebut sudah lebih membaik dan untuk daerah yang masih terbelakang, peluang yang ada masih belum mamou dimanfaatkan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan juga masih rendahnya kualitas SDM yang dimiliki. Karena itulah, pertumbuhan ekonomi pada daerah yang keadaan pembangunannya lebih baik cenderung lebih cepat dibandingkan daerah terbelakang yang masih belum mengalami kemajuan. Karena apabila pembangunannya masih lamabat maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi di daerah itu semain melambat juga. Dan ini nantinya yang akan

menyebabkan ketimpangan yang berbeda – beda di setiap daerah (Syafrizal, 2008).

Indeks Pembangunan Manusia

IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan. IPM di suatu daerah berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. keterkaitan kedua variabel ini dijelaskan oleh Becker dalam teorinya dimana kualitas IPM yang baik akan mendorong berkurangnya tingkat ketimpangan pendapatan di suatu daerah. Dimana Becker menjelaskan bahwa pendidikan formal memiliki peran untuk mendorong perbaikan ekonominya. Semakin tinggi kualitas sumber daya yang dimiliki oleh manusia maka semakin tinggi pula produktivitasnya. Becker menyatakan bahwa IPM berpengaruh negative terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Hal yang sama juga dijelaskan dalam teori *Human capital*, yaitu adanya pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan distribusi pendapatan akan berkurang karena peran pendidikan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini menganggap pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh produktivitas perorangan. Apabila setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Farhan, Muhammad & Sugianto (2022) memberikan pandangan yaitu IPM memiliki pengaruh negatif terhadap disparitas pendapatan. kualitas IPM dapat berkembang apabila suatu daerah memberikan fasilitas seperti kesehatan, pendidikan yang layak. Karena fasilitas tersebut memberikan pengaruh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebi baik dengan begitu masyarakat akan layak memperoleh pekerjaan yang lebih tinggi dengan upah yang tinggi. Semakin tinggi rata – rata pendapatan yang diterima, maka tingkat ketimpangan

pendapatan juga menurun. Oleh karena itu, penurunan IPM memberikan pengaruh terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan dan begitu juga sebaliknya.

Pengangguran

Mengukur jumlah pengangguran adalah tugas badan pusat statistik negara yang menghimpun data pengangguran dan aspek – aspek pasar tenaga kerja lain, seperti jenis pekerjaan, jam kerja rata – rata dan durasi pengangguran, hal tersebut dikemukakan oleh (Mankiw et al., 2014) Badan Pusat Statistik (BPS) negara biasanya mengelompokkan orang dewasa pada setiap rumah tangga yang disurvei ke dalam salah satu kategori berikut, yakni : bekerja, pengangguran dan tidak termasuk angkatan kerja.

Menurut Sjafrizal (2014) tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat daerah. Tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakatnya masih rendah, demikian pula sebaliknya. Indikator ini sangat penting bagi negara dengan penduduk besar sehingga penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak merupakan sasaran utama pembangunan daerah yang bersifat strategis.

Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Ditinjau dari sudut individual, pengangguran menimbulkan masalah ekonomi dan sosial kepada siapa yang mengalami. Ketiadaan pendapatan menyebabkan para penganggur mengurangi pengeluaran konsumsinya. Selain itu, pengangguran juga dapat mempengaruhi taraf kesehatan keluarga (Sukirno, 2006).

Jumlah pengangguran di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh jumlah lapangan kerja yang tersedia. Terbatasnya jumlah lapangan kerja yang tersedia akan menyebabkan para tenaga kerja akan kesulitan mencari pekerjaan dan berpotensi untuk menganggur. Pada akhirnya Tingkat Pengangguran di daerah

tersebut akan meningkat. Dengan tingginya tingkat pengangguran di wilayah tersebut maka akan menyebabkan semakin tidak merata atau ketimpangan pendapatan yang beredar di masyarakat semakin tinggi. (Yoertiara & Feriyanto, 2022) juga mengatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Dimana tingginya pengangguran pada suatu daerah menandakan bahwa masih banyak tenaga kerja yang belum mendapatkan untuk bekerja serta tidak memiliki produktivitas kerja sehingga tidak memperoleh upah atau pendapatan. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah semakin melebar.

METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah faktor – faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dan subjek dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Sumatera Utara melalui situs <https://bps.sumut.go.id>. Periode penelitian ini dimulai dari tahun 2018-2022. Populasi dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/kota. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di bawah, dapat dipastikan bahwa hasil estimasi regresi linear berganda ialah sebagai berikut :

Tabel 1 Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.311818	0.209905	6.249568	0.0000
PERTUMBUHAN_EKONOMI	0.001016	0.000966	1.051011	0.2952
IPM	-0.014708	0.002934	-5.013331	0.0000
TPT_PERSEN	0.000905	0.002512	0.360197	0.7193

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.705776	Mean dependent var	0.277109
Adjusted R-squared	0.625324	S.D. dependent var	0.037337
S.E. of regression	0.022854	Akaike info criterion	-4.528162
Sum squared resid	0.066857	Schwarz criterion	-3.847704
Log likelihood	407.3093	Hannan-Quinn criter.	-4.251922
F-statistic	8.772638	Durbin-Watson stat	2.070599
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil output diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$\text{Gini Rasio} = 1.311818 + 0.001016(\text{PE}) - 0.014708(\text{IPM}) + 0.000905(\text{TPT})$$

Persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Variabel secara menyeluruh
Diperoleh nilai konstanta sebesar 1.311818 memiliki arti bahwa jika variabel bebas seperti pertumbuhan ekonomi, IPM dan pengangguran di kab/kota di Sumatera Utara adalah konstan, maka tingkat ketimpangan pendapatan akan sebesar 1.311818%.
- Variabel Pertumbuhan Ekonomi(PE)
Diperoleh koefisien regresi pertumbuhan ekonomi sebesar 0.001016 artinya setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi kab/kota di Sumatera Utara sebesar satu persen maka tingkat ketimpangan pendapatan akan meningkat sebesar 0.001016%.
- Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Dari hasil regresi diperoleh koefisien IPM sebesar -0.014708 artinya setiap peningkatan IPM kab/kota di Sumatera Utara sebesar satu persen maka tingkat ketimpangan pendapatan akan menurun sebesar 0.014708%.
- Variabel Tingkat pengangguran
Diperoleh koefisien regresi tingkat pengangguran terbuka sebesar 0.000905 artinya setiap peningkatan tingkat pengangguran terbuka kab/kota di Sumatera Utara sebesar satu persen maka

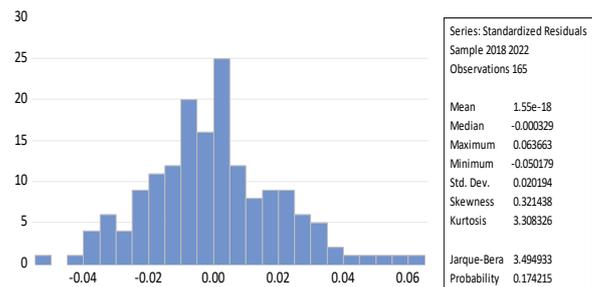
tingkat ketimpangan pendapatan akan meningkat sebesar 0.000905%.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian asumsi statistic yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bahwa model estimasi yang diperoleh benar – benar memenuhi asumsi dasar untuk regresi data panel. Berikut uji asumsi klasik yang dilakukan.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk melihat apakah data yang ada pada penelitian berdistribusi normal atau tidak. Pada uji ini syarat untuk data dikatakan berdistribusi normal ialah dengan melihat nilai probabilitasnya lebih besar atau sama dengan 0.05. Berikut tabel hasil uji normalitas.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

Sumber : Data diolah, 2023

Data yang diolah menunjukkan bahwa (Prob. Jarque – Berra) memiliki probabilitas 0.174215 yang lebih besar dari 0.05 yang artinya data terdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk melihat apakah terdapat korelasi antar variabel independen yakni tingkat pertumbuhan ekonomi, IPM, dan TPT maka diperlukan uji multikolinieritas. Untuk mengetahui persamaan regresi mengandung multikolinieritas dapat dilihat dengan cara melihat nilai korelasi dan VIF. Dalam penelitian ini dilihat dari nilai korelasinya. Jika nilai korelasi >0,8 maka terdapat multikolinieritas.

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

	PERTUMBUHAN EKONOMI	IPM	TPT_PERS EN
PERTUMBUHAN EKONOMI	1	-0.0511727	-0.1576821
IPM	0.0511727	1	0.49980774
TPT_PERS EN	-0.1576821	0.49980774	1

Sumber : Data diolah, 2023

Hasil pengolahan data memperlihatkan bahwa koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0.80 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas terhadap variabel – variabel independent. Uji multikolinearitas dipakai untuk memastikan apakah ada korelasi antar variabel bebas dalam penelitian.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang dimaksudkan untuk melihat apakah di dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual di dalam suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Syarat uji heteroskedastisitas ialah bila signifikan > 0.05 berarti tidak terjadi masalah heteroskedastisitas sedangkan bila < 0.05 maka terdapat permasalahan heteroskedastisitas pada model persamaan yang digunakan. Berikut hasil uji heteroskedastisitas:

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.071958	0.108720	-0.661866	0.5092
PERTUMBUHAN_EKONOMI	0.000177	0.000502	0.353002	0.7247
IPM	0.001289	0.001522	0.846908	0.3986
TPT_PERS EN	-0.000920	0.001294	-0.710538	0.4787

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, diperoleh nilai probabilitas masing – masing variabel > 0.05 , ini berarti bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

1. Uji T (Uji Parsial)

Pengujian uji t atau uji parsial dilakukan untuk melihat pengaruh secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi, IPM dan pengangguran terhadap variabel ketimpangan distribusi pendapatan. Kriteria pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas tiap variabel dengan tingkat signifikansi 5% (0,05).

Hasil Uji Statistik pada hipotesis penelitian ini ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4 Hasil Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.311818	0.209905	6.249568	0.0000
PERTUMBUHAN_EKONOMI	0.001016	0.000966	1.051011	0.2952
IPM	-0.014708	0.002934	-5.013331	0.0000
TPT_PERS EN	0.000905	0.002512	0.360197	0.7193

Sumber : Data diolah, 2023.

Adapun hasil uji t - statistik (uji hipotesis secara parsial) adalah sebagai berikut :

- Koefisien variabel pertumbuhan ekonomi diperoleh dari hasil estimasi yang dilakukan adalah 0.001016 dengan probabilitas sebesar $0.2952 > 0.05$. Hasil tersebut menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.
- Koefisien variabel IPM diperoleh dari hasil estimasi yang dilakukan adalah -0.014708 dengan probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$. Hasil tersebut menyatakan bahwa IPM berpengaruh negative dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.
- Koefisien variabel tingkat pengangguran terbuka diperoleh dari hasil estimasi yang dilakukan adalah 0.000905 dengan probabilitas sebesar $0.7193 > 0.05$. Hasil tersebut menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F bertujuan untuk melihat pengaruh semua variabel independen secara simultan terhadap semua variabel dependen dengan melakukan perbandingan nilai probabilitas F-statistik dengan tingkat signifikansi. Berikut output regresi untuk melihat hasil uji F.

Tabel 5 Hasil Uji Simultan

F-statistic	8.772638
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diolah, 2023

Dari tabel diatas diperoleh hasil pengujian yang dilakukan, secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, IPM dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel ketimpangan pendapatan terlihat dari nilai prob(F- statistik) yaitu 0.000000 < tingkat alpha (0.05).

3. Uji Adjusted R – Square (R^2)

Uji koefisien Determinasi (R^2) merupakan uji untuk menilai seberapa besar pengaruh dari variabel X terhadap Y atau dengan kata lain untuk menguji seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat di dalam suatu model. Semakin mendekati 1 nilai R^2 maka semakin erat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, sedangkan sebaliknya semakin mendekati 0 nilai R^2 maka variabel bebas secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel terikat di dalam model tersebut. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.705776
Adjusted R-squared	0.625324

Sumber : Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh nilai R- Square sebesar 0.705776. Hal ini berarti bahwa model persamaan yang dipakai mampu menjelaskan hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Ketimpangan Pendapatan sebesar 70,57% dan sisanya sebesar 29,43% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil output estimasi yang diperoleh koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar 0.001016 dengan nilai probabilitas 0.2952 > 0.05. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara. Nilai koefisien yang diperoleh dari hasil estimasi mengartikan bahwa apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sekitar 1% akan terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan sebanyak **0.001639%** pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2017 – 2021.

Hal ini sesuai dengan penjelasan teori kuznest yaitu dalam jangka pendek pertumbuhan ekonomi akan berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan yang artinya meningkatnya pendapatan juga akan meningkatnya ketimpangan pendapatan. (Todaro, Michael P & Smith, 2011) juga menjelaskan masalah yang terjadi bukan hanya soal meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan tetapi siapa saja yang akan berkontribusi untuk menumbuhkannya, apakah sebagian kecil orang atau banyak orang. Apabila peningkatan hanya dilakukan oleh sebagian kecil orang yang merupakan berpendapatan tinggi, maka peningkatan yang terjadi akan memberikan banyak manfaat bagi mereka. Akan tetapi jika pertumbuhan dihasilkan oleh banyak orang, maka mereka pula yang akan ikut merasakan manfaatnya, sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih merata. Masalah yang sering terjadi adalah Ketika pertumbuhan ekonomi tidak memberi manfaat bagi orang miskin, sehingga menyebabkan memburuknya ketimpangan dan kemiskinan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Ayu et al., 2019) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2016 ”. Dan juga sejalan dengan penelitian (Sarina, 2019) dengan hasil

penelitian yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap disparitas pendapatan antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan Ekonomi haruslah melibatkan kontribusi semua kalangan masyarakat yang artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor – sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu di sektor pertanian atau sektor padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil analisis estimasi diperoleh nilai koefisien indeks pembangunan manusia yaitu sebesar -0.014708 dengan probabilitas $0.0000 < 0.05$. Ini berarti IPM mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. Hasil output estimasi menjelaskan bahwa apabila terjadi peningkatan IPM sekitar 1% akan terjadi penurunan ketimpangan pendapatan sebesar 0.014708% pada 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2017 – 2021.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Becker yang dimana dikatakan bahwa IPM berpengaruh negative terhadap ketimpangan, Becker mengkaji lebih dalam mengenai peran pendidikan formal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi menyatakan bahwa, semakin tinggi Pendidikan formal yang diperoleh, maka produktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi pula. Teori ini menganggap bahwa jika setiap orang memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena pendidikannya lebih tinggi, maka pertumbuhan ekonomi penduduk dapat ditunjang, dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan

berpengaruh negative terhadap ketimpangan pendapatan.

Selain itu, penelitian ini didukung pada penelitian (Suryani & Woyanti, 2021) dalam penelitiannya dimana hasil penelitiannya juga sama dengan penelitian ini yaitu IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2010 – 2018. Hal yang sama juga diperoleh (Farhan & Sugianto, 2022) pada penelitiannya dimana hasil penelitiannya juga sama dengan penelitian ini yaitu IPM berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa periode 2014 – 2020.

Kualitas IPM dapat meningkat di suatu daerah diakibatkan daerah tersebut memiliki fasilitas kesehatan, pendidikan yang layak dan juga layanan yang diterima masyarakat juga baik. Inilah nantinya yang akan meningkatkan kualitas pembangunan manusia di daerah tersebut. dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan berdampak pada semakin baiknya pekerjaan yang akan diperoleh masyarakat di daerah tersebut. Masyarakat yang memiliki kualitas sumber daya yang tinggi akan mendapatkan pekerjaan yang tinggi dan nantinya akan menerima upah yang tinggi juga. Semakin tinggi rata – rata pendapatan yang diterima, maka tingkat pendapatan masyarakat juga akan semakin membaik dan ini akan membuat rendahnya ketimpangan pendapatan di daerah tersebut.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil pengujian diperoleh koefisien pengangguran sebesar 0.000905 dengan probability sebesar $0.7193 < 0.05$. Hal ini berarti bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi Sumatera Utara. Dari nilai regresi untuk pengangguran menyatakan jika tingkat pengangguran terbuka meningkat 1% maka ketimpangan pendapatan akan meningkat sebesar 0.000905% pada 33 kabupaten/kota

di Provinsi Sumatera Utara periode 2017 – 2021.

Dijelaskan oleh (Syafrizal, 2014) dalam bukunya bahwa tingkat pengangguran yang tinggi mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakatnya masih rendah, demikian pula sebaliknya. Karena tingkat pengangguran merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan juga (Sukirno, 2011) menjelaskan bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Dimana tingginya pengangguran pada suatu daerah menandakan bahwa masih banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh upah atau pendapatan. Maka seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan akan mengakibatkan ketimpangan pendapatan di suatu wilayah semakin melebar.

Penelitian ini didukung oleh penelitian (Yanto, 2020) yang menunjukkan bahwa variabel tingkat pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Begitu juga dengan temuan (Yoertiara & Feriyanto, 2022) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan provinsi – provinsi di pulau Jawa.

Pengangguran dapat menyebabkan hilangnya sumber penghasilan bagi individu atau keluarganya. Hal ini tentu akan memperparah ketimpangan pendapatan karena individual tau keluarga yang kehilangan penghasilan akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka terutama pada kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal serta kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan. Kesehatan dan Pendidikan yang sulit terpenuhi akan memberikan dampak dimana akan banyak masyarakat yang atau anak – anak yang tidak memiliki sumber daya manusia yang baik dan juga akan banyak anak – anak yang memiliki tingkat kesehatan yang rendah seperti kurang gizi dan ini nantinya akan mempengaruhi pola pikir mereka dan

kemungkinan akan menambah angka kemiskinan lagi dimana mereka menganggap bahwasanya orang tuanya sudah miskin maka mereka pun akan menjadi orang miskin juga. Dan ini nantinya akan mempengaruhi ketimpangan pendapatan dimana semakin tinggi angka kemiskinan maka akan semakin besar jurang antara orang kaya dengan orang miskin. Oleh karena itu, semakin meningkat angka pengangguran maka akan semakin tinggi pula angka ketimpangan pendapatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 – 2021.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 – 2021.

Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 – 2021.

Pertumbuhan Ekonomi, IPM dan Tingkat Pengangguran Terbuka secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan ketimpangan pendapatan sebesar 70,57% dan sisanya 29,43% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan penulis ialah pemerintah dapat melakukan pemerataan terhadap beberapa daerah yang kondisinya sangat timpang dibandingkan daerah lain dengan melakukan pembangunan yang merata terhadap beberapa daerah lainnya.

Pemerintah dan juga perusahaan dapat bekerja sama untuk mengurangi angka pengangguran yang ada yaitu dengan membuka lapangan pekerjaan baru atau

dengan memberikan bantuan atau pelatihan kepada masyarakat agar mampu membuka usaha sendiri dan ini nantinya jika berhasil maka akan tercipta lapangan kerja baru dan pastinya akan membantu pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran yang menyebabkan masalah sosial ekonomi. Oleh karena itu, hal ini harus diberikan perhatian serius karena apabila tingkat pengangguran berkurang maka tentu akan mengurangi angka ketimpangan di kabupaten/kota di Sumatera Utara juga.

Untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar meninjau variabel lain yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan, agar nantinya dapat menjadi tambahan referensi dan guna penyempurnaan hasil penelitian ini.

REFERENSI

- Arafah, M., & Khoirudin, R. (2022). Analisis Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 628–636.
- Ayu, D. F., Riani, W., & Haviz, M. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2016. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 5(1), 214–220.
- BPS. (2015). Indeks Pembangunan Manusia 2014 Metode Baru. Badan Pusat Statistik.
- Chayyani, N. R. (2021). *Ketimpangan Pendapatan Dan Pemulihan Ekonomi Nasional*. The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, 110.
- Chrisamba, G. (2015). ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN 33 PROVINSI DI INDONESIA PERIODE 2007-2012.
- Dea Fajar Ayu, et al. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Jumlah Penduduk terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2016. *Jurnal Prosiding Ilmu Ekonomi*, 5(1).
- Farhan, M., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(4), 243–258.
- Faried, A. I. et al. (2023). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Mankiw, N. G., Quah, E., & Wilson, P. (2014). *Pengantar Ekonomi Makro*. Salemba Empat.
- Ns.Hidayati, & dkk. (2022). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Pradina Pustaka.
- Sarina. (2019). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 - 2017. *UIN Alaudin Makassar*.
- Syafrizal. (2008). *Ekonomi Regional. Teori&Aplikasi*. Baduose Media.
- _____. (2014). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (1st ed.). Rajawali Pers.
- Sukirno, S. (2006). *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar* (1st ed.). Rajagrafindo Persada.
- _____. (2007). *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Universitas Bengkulu.
- _____. (2011). *MAKRO EKONOMI TEORI PENGANTAR* (3rd ed.). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- _____. (2016). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. PT. Rajawali Pers.

- Suryani, K. G., & Woyanti, N. (2021). The Effect of Economic Growth, HDI, District/City Minimum Wage and Unemployment on Inequity of Income Distribution in Province of D.I Yogyakarta (2010-2018). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 36(2), 170.
- Tiara, S. (2009). ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROPINSI SUMATERA UTARA. 4(2).
- Todaro, Michael P & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (11th ed.). Erlangga, 283.
- Todaro, M. P. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. ERLANGGA.
- Yanto,A.D.(2020).Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2013 - 2017.
- Yoertiara, R. F., & Feriyanto, N. (2022). Pengaruh pertumbuhan ekonomi , IPM , dan tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan provinsi-provinsi di pulau Jawa. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 92–100.